

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *"The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence"*. ([www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id))

## **2. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021

melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya pada tanggal 1 februari 2021, secara resmi hadir BSI ( Bank Syariah Indonesia).

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa

pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

### **3. PT. Bank BCA Syariah Tbk**

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia Tbk sebesar 99.9999% dan PT BCA Finance sebesar 0.0001% ([www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)).

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di

bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Bank BCA Syariah hingga saat ini memiliki 73 jaringan cabang, 18.050 ATM BCA (data 31 Maret 2022), dan ratusan ribu EDC BCA

#### **4. PT. Bank Mega Syariah Tbk**

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang Didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora(d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta melakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada tanggal 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo

BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak tanggal 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya mencakup ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi misi Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

#### **5. PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk**

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen masyarakat inklusi. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik.

Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-

off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”). BTPN Syariah hingga saat ini memiliki 16 jaring cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah masyarakat inklusi dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, Bank menyediakan beragam produk dan layanan pembiayaan serta membuka akses pelayanan keuangan bagi perempuan prasejahtera produktif untuk mendapatkan modal usaha, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan [#deminiatbaik](#) agar terwujud lebih cepat.

## **6. PT. Bank Victoria Syariah Tbk**

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertamanya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

#### **7. PT. Bank Jabar banten Syariah Tbk**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan saham perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memutuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM ) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.

Adapun visi dan misi dari Bank bjb syariah adalah meningkatkan akses keuangan syariah yang amanah berbasis layanan digital, bersama membangun ekosistem ekonomi syariah terutama keuangan haji, memberikan nilai tambah yang optimal bagi stakeholder serta mendukung perekonomian daerah usaha kecil dan menengah (UKM) serta mengembangkan budaya layanan digital yang inovatif.

#### **8. PT. Bank Aceh Syariah Tbk**

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan

perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka perwakilan kantor cabangnya di Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Dibukanya Kantor Cabang Bank Aceh di Jakarta merupakan representasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan transaksi perbankan di tengah persaingan sektor perbankan. Kehadiran di Jakarta diharapkan mampu memberikan dukungan bagi akselerasi pengelolaan keuangan, baik kepada sektor privat, swasta, maupun pemerintah daerah.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 Unit CRM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

#### **9. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Tbk**

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2018-2022.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Sesuai hasil keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses konversi yang membutuhkan waktu selama hamper 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubajam kegiatan usaha Bank Umum Konvensional, menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.

#### **10. PT. Bank Syariah Bukopin Tbk**

PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam akta

nomor 28 tahun Tanggal 31 Maret 2008 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Sampai dengan Desember 2022 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, dan serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.

## B. Penyajian Data

### 1. Pengukuran kinerja Bank Umum Syariah ditinjau dari *Sharia Maqasid Index* (SMI)

Untuk mengetahui sejauh mana Bank Umum Syariah dalam melaksanakan setiap tujuan–tujuan Maqasid Syariah dapat di ukur melalui rasio kinerja *Sharia Maqasid Index* yang telah dibagi kedalam tiga tujuan yaitu :

1. *Tahdzib al Fard* (Mendidik Individu)
2. *Iqamah al-adl* (Menegakan Keadilan)
3. *Jabl al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan).

Berikut adalah rasio kinerja *Sharia Maqasid Index* pada 10 Bank umum Syariah periode 2018-2022 untuk setiap tujuannya:

#### 1. Tujuan pertama : Mendidik Individu (*Tahzib al Fard*).

Adanya pendidikan bagi setiap individu ini bertujuan agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan, bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat yang berada di lingkungannya. Mendidik individu dalam bank syariah bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial semata, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pada tujuan pertama ini terdapat empat rasio pengukuran, yaitu hibah pendidikan (R11), penelitian (R21), Pelatihan (R31) dan publisitas

/promosi (R41). Rasio tersebut diukur dalam tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kepedulian bank syariah untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk para stakeholdernya. Berikut adalah tabel rasio kinerja *Sharia Maqasid Index* untuk tujuan pertama :

**Tabel 4.1 Rasio Kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Tujuan Pertama Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R11	R21	R31	R41
BMI	63.116,44	1.179,26	0	47.982,98
BSI	1.115.085,03	0	0	93.980,50
BBS	42.922,13	0	0	1.455.132,39
BMS	32.529,13	0	0	0
BTPNS	32.773,82	0	0	963.589,85
BVS	13.693,33	0	0	8.061,49
BJBS	23.811,75	13.466,37	0	0
BAS	50.636,90	0	0	0
BNTBS	44.006,27	0	0	62.896,94
BSB	0,00	0	18.433,94	30.834,98

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tujuan pertama rasio hibah pendidikan (R11). Hibah pendidikan adalah bentuk tanggung jawab sosial bank syariah kepada masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada lembaga pendidikan terpilih. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah yang menyalurkan dana pendidikan tertinggi, bahkan semakin meningkat disetiap tahunnya. Rata-rata total rasio hibah pendidikan Bank Syariah Indonesia adalah sebesar Rp.1.115.085,03 dari total pengeluarannya ditujukan untuk donasi pendidikan. Hal ini tak lepas dari program pendidikan andalan yang dijalankan BSI yaitu program beasiswa seperti: program Beasiswa BSI Inspirasi, yaitu Program beasiswa dengan

menggunakan dana Zakat diperuntukan untuk mahasiswa yang membutuhkan dengan tujuan melakukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian program Beasiswa BSI Prestasi, yaitu program beasiswa menggunakan dana Infaq diperuntukan untuk Mahasiswa berprestasi

Tujuan pertama rasio penelitian (R21), Bank syariah berkewajiban untuk melakukan penelitian melalui tenaga sumber daya manusia yang dimiliki, agar dapat menilai sejauh mana kesesuaian implementasi nilai dan prinsip syariah dalam aktivitas muammalah yang dijalankan. Serta mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap produk produk keuangan syariah dan regulasi yang berlaku. Pada rasio ini hanya dijalankan oleh 2 bank umum syariah saja yaitu Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) dengan nilai sebesar Rp.13.466,37 dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai sebesar Rp.1.179,26. BJBS mengalokasikan dana terbesar untuk kegiatan riset dan pengembangan dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Riset dan pengembangan sangat dibutuhkan oleh bank umum syariah dalam mendukung kemajuan dan keberlangsungan perusahaan dalam menghadapi persaingan.

Tujuan pertama rasio pelatihan (R31), Hal ini dapat terlihat dari sejumlah dana yang dialokasikan untuk mengikutkan para pegawainya pada kegiatan pelatihan dan training pegawai. Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan ini membantu

memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah, dan berkontribusi pada pengembangan industri bank syariah secara keseluruhan. Pada rasio ini hanya dijalankan oleh Bank syariah Bukopin (BSB) dengan nilai sebesar Rp.18.433,94. Jumlah pelatihan, jumlah peserta maupun alokasi dana yang digunakan oleh Bank Syariah Bukopin mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bank Syariah Bukopin menyadari bahwa investasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya insani yang dimiliki merupakan kunci kesuksesan yang berkualitas.

Tujuan pertama rasio publisitas/promosi (R41), Sebagai salah satu bukti keterlibatan bank syariah dalam melakukan publisitas tentang produk dan layanan bank syariah kepada masyarakat ialah alokasi biaya publikasi/promosi. Promosi pada bank syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Didalam Rasio ini Bank BCA Syariah (BBS) memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.1.455.132,39 dari total pengeluarannya ditujukan untuk publisitas/promosi. Sebaliknya nilai terendah terjadi pada Bank Victoria Syariah (BBS) sebesar Rp.8.061,49. Kegiatan promosi menjadi sangat penting bagi bank umum syariah, tidak hanya

sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produknya, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem operasionalnya. Dengan melakukan publikasi dan promosi secara aktif, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah akan meningkat. Bank BCA Syariah telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam kegiatan promosinya, seperti melakukan kemitraan keuangan dengan asosiasi, perusahaan, komunitas, atau yayasan, menyelenggarakan sponsorships, beriklan di media massa, dan melakukan komunikasi pemasaran.

## 2. Tujuan kedua: Menegakkan Keadilan (*Iqamah Al-Adl*).

Menegakkan keadilan dalam bank syariah merupakan salah satu prinsip utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam semua transaksi ekonomi. Dalam hal ini bank syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Adil yang dimaksud disini ialah adil kepada semua pihak tanpa melihat perbedaan agama. Dalam pandangan Islam, ekonomi yang adil menempatkan penekanan pada distribusi yang merata dari sumber daya dan kesempatan, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi. Menegakkan keadilan juga melibatkan

upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin menjadi penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Pada tujuan Kedua ini terdapat tiga rasio pengukuran, yaitu pengembalian yang adil (R12), harga produk terjangkau (R22) dan produk bank non bunga (R32). Pengukuran ketiga elemen ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komitmen bank umum syariah untuk menegakkan keadilan ekonomi. Berikut adalah tabel rasio kinerja *Sharia Maqasid Index* untuk tujuan kedua :

**Tabel 4.2 Rasio Kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Tujuan Kedua Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R12	R22	R32
BMI	99.717,15	167.452,82	3.924.257,68
BSI	1.181.200,56	131.707,41	5.451.556,65
BBS	1.038.955,40	1.377.609,08	3.718.403,23
BMS	1.283.668,85	48.364,98	3.846.447,70
BTPNS	1.448.076,16	40.112,98	3.973.818,29
BVS	233.916,67	246.077,72	4.461.544,79
BJBS	423.001,24	246.656,78	8.290.727,14
BAS	1.174.857,76	1.214.240,208	4.598.551,66
BNTBS	1.217.889,60	42.569,88	3.345.392,38
BSB	1.110.058,87	165.250,52	3.977.792,43

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga rasio untuk mengukur sejauh mana bank umum syariah dalam menegakkan keadilan. Untuk tujuan kedua rasio pengembalian yang adil (R12), Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS) memiliki nilai tertinggi yaitu Rp.1.448.076,16, sedangkan Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai terendah

yaitu Rp.99.717,15. Pengembalian yang adil dicerminkan oleh penggunaan *Profit Equalization Reserves* (PER). Ketika bank syariah mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk *Profit Equalization Reserve*, hal ini dapat dianggap mengurangi hak deposan atas keuntungan mereka, yang bisa dilihat sebagai bentuk ketidakadilan. Rasio PER yang tinggi menunjukkan ketidakadilan ini. Namun, memiliki PER yang tinggi sendiri tidak serta merta menjamin bahwa bank tidak menerapkan ketidakadilan kepada nasabah. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan itu sendiri.

Tujuan kedua rasio harga produk terjangkau (R22), Bank syariah memiliki berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah yang mempunyai produk yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya dituntut untuk menawarkan produk produk yang terjangkau oleh para nasabah. Hal ini membantu mendorong inklusi keuangan dan memberikan alternatif yang adil dan berkelanjutan bagi nasabah. Dalam hal ini dijelaskan oleh rasio piutang *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* serta pembiayaan *musyarakah* terhadap total investasi. Pada rasio ini Bank Aceh Syariah (BAS) memiliki nilai tertinggi yaitu Rp.1.214.240.208, sedangkan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS) memiliki nilai terendah yaitu

Rp. 40.112,98. Pembiayaan dengan skema bagi hasil dianggap lebih adil karena bank turut merasakan kondisi di sektor riil, baik saat untung maupun rugi. Skema ini juga mencerminkan hubungan kemitraan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan.

Tujuan kedua rasio produk bank non bunga (R32), Bank syariah diharuskan untuk menjalankan aktivitas perbankannya khususnya pada saat melakukan investasi dan pembiayaan tanpa ada unsur riba di dalamnya. Selain itu juga bank syariah menawarkan berbagai produk yang tidak melibatkan bunga (riba) untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menawarkan produk-produk tersebut, bank syariah memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari riba dan memastikan keadilan serta keseimbangan dalam setiap transaksi. Produk-produk tersebut juga memberikan alternatif yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem perbankan konvensional. Dalam hal ini dicerminkan melalui rasio pendapatan non bunga dibandingkan dengan total pendapatan. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) memiliki nilai tertinggi yaitu Rp.8.290.727,14. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah memiliki struktur pendapatan yang didominasi dari pendapatan non-bunga. Dengan menawarkan berbagai produk non-bunga juga menunjukkan komitmen bank

tersebut untuk beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS) memiliki nilai terendah yaitu 3.345.392,38.

3. Tujuan Ketiga: Mencapai Kesejahteraan (*Jabl al-Maslahah*). Masalah yang dimaksudkan oleh Islam ialah masalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya kepentingan sebagian orang. Dalam hal manfaat atau kesejahteraan bagi kepentingan umum yaitu bank umum syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar bagi masyarakat, seperti halnya investasi di sektor-sektor penting, pembiayaan sektor riil dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip *Jabl Al-Maslahah*, bank syariah berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga mendukung kesejahteraan umum dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pada tujuan ketiga ini terdapat tiga rasio pengukuran, yaitu rasio laba (R13), pendapatan personal (R23) dan rasio investasi pada sektor riil (R33). Pengukuran ketiga elemen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana bank syariah melaksanakan tujuannya dalam mendorong kesejahteraan atau kemasalahtan. Berikut adalah tabel rasio kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) untuk tujuan ketiga:

**Tabel 4.3 Rasio Kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Tujuan Ketiga Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R13	R23	R33
BMI	1.039.296,27	1.112.241,35	0
BSI	1.181.200,56	131.707,41	5.451.556,65
BBS	44.883,61	2.351.944,56	28.779.371,36
BMS	95.410,74	23.046.615,71	7.382,84
BTPNS	1.125.294,12	0	38.093,44
BVS	394.906,14	4.603,72	0
BJBS	124.898,93	1.410.137,90	0
BAS	23.393,70	10.633,05	0
BNTBS	157.390,79	113.849,20	27.853,72
BSB	55.690,87	824.484,07	0

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa rasio pertama tujuan ketiga, yaitu rasio laba (R13). Kemampuan sebuah bank syariah dalam mengelola kekayaannya secara optimal dan bijaksana untuk meraih laba yang tinggi merupakan bentuk dari *hifzul maal* (penjagaan terhadap harta). Laba yang tinggi memungkinkan bank syariah berkontribusi lebih besar terhadap pajak untuk pembangunan negara serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam tujuan ketiga ini Bank Syariah Indonesia mencapai nilai tertinggi dengan nilai sebesar Rp.1.181.200,56, sedangkan Bank Aceh Syariah (BAS) memperoleh nilai terendah sebesar Rp. 23.393,70.

Rasio kedua adalah pendapatan personal (R23) yang tercerminkan oleh rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank umum

syariah terhadap aset bersihnya. Nilai zakat yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk membayar zakat. Ini bisa mencerminkan kesehatan keuangan dan keberhasilan bisnis bank. Bank syariah juga diharapkan dapat menjadi mitra yang penting dalam pengelolaan zakat dan distribusi dana zakat, serta dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya zakat dalam Islam. Bank Mega Syariah (BMS) memperoleh nilai tertinggi dengan nilai sebesar Rp.23.046.615,71, sedangkan Bank Victoria Syariah (BVS) memperoleh nilai terendah dengan nilai sebesar Rp.4.603,72. dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS) tidak mempublikasikan nominal zakatnya di laporan keuangan.

Rasio ketiga yaitu rasio investasi pada sektor riil (R33), Bank syariah berinvestasi di sektor riil dengan cara mendanai proyek-proyek yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Dengan berinvestasi pada sektor riil, bank syariah tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini yang dicerminkan oleh rasio investasi bank syariah di sektor riil dibandingkan dengan keseluruhan investasi bank syariah. Bank BCA Syariah (BBS) memiliki nilai tertinggi dengan nilai sebesar yaitu

Rp.28.779.371,36 dari investasi yang dilakukan oleh BRIS, dimana sebagian disalurkan ke sektor riil dan sisanya ke sektor keuangan, merupakan yang tertinggi di antara bank syariah lainnya. Aktivitas investasi di sektor riil diyakini memberikan dampak langsung yang positif kepada perekonomian masyarakat dibandingkan dengan aktivitas investasi di sektor keuangan. Bank Mega Syariah (BMS) memperoleh nilai terendah dengan nilai sebesar Rp.7.382,84 dan beberapa bank umum syariah tidak mempublikasikan nominal investasinya di laporan keuangannya.

## **2. Indikator Kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Bank Umum Syariah**

Tahap selanjutnya adalah penentuan *Sharia Maqasid Index*. *Sharia Maqasid Index* atau SMI merupakan metode pengukuran kinerja bank syariah yang dikembangkan oleh Mustofa Umar Muhammed, Dzuljasri Abdul Rozak dan Fauziah MD taib. pengembangan *Sharia Maqasid Index* didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di bank syariah. ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan bank syariah bersifat multidimensional. Metode untuk menghitung indikator kinerja *Sharia Maqasid Index* adalah *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berikut adalah

indikator kinerja setiap bank umum syariah berdasarkan tujuan-tujuan

*Sharia Maqasid index (SMI)*:

**Tabel 4.4 Indikator kinerja *Sharia Maqasid Index (SMI)*  
Tujuan pertama Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Indikator Kinerja Tujuan 1 (IK(T1))				Total
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	4.544,38	69.924,94	0	3.310,83	77.780,15
BSI	80.286,12	0	0	6.484,65	86.770,78
BBS	3.090,39	0	0	197.310,94	200.401,33
BMS	2.342,10	0	0	0	2.342,10
BTPNS	2.359,72	0	0	66.487,70	68.847,42
BVS	985,9199699	0	0	690,1487076	1676,068677
BJBS	1.714,45	4.359,14	0	0	6.073,59
BAS	3.645,86	0	0	0	3.645,86
BNTBS	3.168,45	0	0	4.339,89	7.508,34
BSB	0	0	1.437,85	2.127,61	3565,460988

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada tabel 4.4 diatas tujuan pertama yaitu mendidik individu (Tahzib al-Fard), Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank umum syariah yang memiliki indikator kinerja tertinggi dalam memberikan kontribusi di bidang pendidikan pada masyarakat dengan nilai rasio sebesar Rp. 80.286,12. Nilai ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank umum syariah yang memiliki alokasi dana untuk riset dan pengembangan yang paling tinggi di antara bank umum syariah lain dengan nilai rasio sebesar Rp.69.924,94, nilai ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dalam bidang pelatihan dan pengembangan *skill* untuk karyawan, hanya Bank Syariah Bukopin (BSB) yang mencatatkan nilai pada laporan keuangannya dengan nilai rasio sebesar Rp1.437,85., nilai ini terus mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Bank BCA Syariah (BBS) memiliki indikator kinerja tertinggi dalam hal publikasi dengan nilai rasio sebesar Rp.197.310,94, nilai ini terus mengalami fluktuasi

setiap tahunnya. Secara keseluruhan, Bank BCA Syariah (BBS) lebih baik dalam mencapai tujuan pertama dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya dengan nilai rasio sebesar Rp.200.401,33.

**Tabel 4.5 Indikator kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Tujuan kedua Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Indikator Kinerja Tujuan 2 (IK(T2))			Total
	IK12	IK22	IK32	
BMI	12.265,21	17.561,98	611.399,35	641.226,54
BSI	139.173,32	9.950,09	834.804,72	983.928,14
BBS	127.791,51	180.742,31	579.327,22	887.861,05
BMS	157.891,27	6.345,48	799.009,06	963.245,82
BTPNS	178.113,37	5.262,82	619.120,89	802.497,08
BVS	39.975,38	32.285,40	695.108,68	767.369,45
BJBS	52.029,15	32.361,37	1.291.695,29	1.376.085,81
BAS	144.507,50	19.354.801	716.454,35	20.215.763,24
BNTBS	149.800,42	5.585,17	521.212,13	676.597,72
BSB	136.537,24	21.680,87	619.740,06	777.958,17

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada tabel 4.5 diatas menunjukkan tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan (Iqamah al-Adl), Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS) adalah bank umum syariah yang memiliki indikator kinerja tertinggi dalam memperoleh laba usahanya dengan nilai rasio sebesar Rp.178.113,37, nilai ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Selanjutnya dalam indikator kinerja kedua, Bank BCA Syariah (BBS) memiliki nilai tertinggi dalam melaksanakan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan nilai rasio sebesar Rp.180.742,31. Nilai ini juga terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bank Jabar Banten Syariah yang memiliki nilai tertinggi dalam indikator kinerja ketiga dengan nilai rasio sebesar Rp.1.291.695,29. Sama seperti bank syariah sebelumnya nilai ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, Bank Aceh syariah (BAS) lebih baik dalam mencapai tujuan kedua

dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya dengan nilai rasio sebesar Rp. 20.215.763,24.

**Tabel 4.6 Indikator kinerja *Sharia Maqasid Index* (SMI) Tujuan ketiga Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Indikator Kinerja Tujuan 3 (IK(T3))			Total
	IK13	IK23	IK33	
BMI	99.460,65	96.765,00	0	196.225,65
BSI	6.968,04	947.202,46	0	954.170,50
BBS	4.295,36	204.619,18	3.088.026,55	3.296.941,08
BMS	9.130,81	2.005.055,57	792,1785783	2.014.978,55
BTPNS	107.690,65	0	4.087,43	111.778,07
BVS	37.792,52	400,5236947	0	38.193,04
BJBS	11.952,83	122.682,00	0	134.634,82
BAS	7.237.314,36	925,0754596	0	7.238.239,44
BNTBS	15.062,30	11.139,09	2.988,70	29.190,09
BSB	5.329,62	71.730,11	0	77059,73015

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa tujuan ketiga mencapai kesejahteraan (Jabl al-Maslahah), Bank Aceh Syariah (BAS) memiliki nilai tertinggi pada indeks kinerja terkait profitabilitas dengan nilai rasio sebesar Rp.7.237.314,36. Nilai ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu Bank Mega Syariah (BMS) memiliki nilai tertinggi pada indeks kinerja zakat tertinggi dengan nilai rasio sebesar Rp.2.005.055,57. Nilai ini juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. sedangkan Bank BCA Syariah (BBS) mencapai indeks kinerja yang paling tinggi pada penyaluran pembiayaan pada sektor riil dengan nilai sebesar Rp.3.088.026,55. Sama seperti bank syariah sebelumnya nilai ini juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, Bank Aceh Syariah (BAS) lebih baik dalam mencapai tujuan ketiga dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya dengan nilai sebesar Rp.7.238239,44.

### 3. *Sharia Maqasid Index* (SMI) Bank Umum Syariah

*Sharia Maqasid Index* merupakan total penjumlahan dari setiap indikator kinerja. Berikut tabel *Sharia Maqasid Index* bank umum syariah pada periode 2018-2022:

**Tabel 4.7 *Sharia Maqasid Index* (SMI) Bank Umum Syariah periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Sharia Mqasid Index (SMI)			
	(IK(T1))	(IK(T2))	(IK(T3))	SMI
BMI	77.780,15	641.226,54	196.225,65	915.232,34
BSI	86.770,78	983.928,14	954.170,50	2.024.869,42
BBS	200.401,33	887.861,05	3.296.941,08	4.385.203,47
BMS	2.342,10	963.245,82	2.014.978,55	2.980.566,47
BTPNS	68.847,42	802.497,08	111.778,07	983.122,57
BVS	1.676,07	767.369,45	38.193,04	807.238,56
BJBS	6.073,59	1.376.085,81	134.634,82	1.516.794,22
BAS	3.645,86	20.215.763	7.238.239,44	27.457.648,53
BNTBS	7.508,34	676.597,72	29.190,09	713.296,15
BSB	3.565,46	777.958,17	77.059,73	858.583,36

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa pelaksanaan tujuan pertama dilakukan paling baik oleh Bank Aceh Syariah (BAS), pada tujuan kedua pelaksanaan terbaik diraih oleh Bank BCA Syariah (BBS), sedangkan untuk pelaksanaan tujuan ketiga dilakukan paling baik oleh Bank Mega Syariah (BMS).

## C. Analisis Data dan Pembahasan Penelitian

### 1. Kinerja Bank Umum Syariah ditinjau dari *Sharia Maqasid Index* (SMI) periode 2018-2022

Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan kinerja bank umum syariah ditinjau dari *Sharia Maqasid Index* pada periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

a. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

*Sharia Maqasid Index* Bank Muamalat Indonesia tahun 2018-2022 sebesar Rp.915.232,34. Kinerja SMI Bank Muamalat Indonesia terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Cakhyaneu (2018) menunjukkan jika nilai SMI Bank Muamalat Indonesia pada rentang tahun 2011-2016 sebesar Rp.223.760. Nilai MSI Bank Muamalat pada tahun 2011-2016 mengalami penurunan dibanding rentang tahun 2018-2022

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai sebesar Rp.77.780,15. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp.641.226,54. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai sebesar Rp. 196.225,65. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Muamalat Indonesia lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator ke dua yaitu Menegakkan keadilan.

b. Bank Syariah Indonesia (BSI)

*Sharia Maqasid Index* Bank Syariah Indonesia tahun 2018-2022 sebesar Rp. 2.024.869,42. Kinerja SMI Bank Syariah Indonesia terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Priyatno, Rohim and Sari (2022) menunjukkan jika nilai SMI Bank Syariah Indonesia pada rentang tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 384.320. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Syariah

Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Syariah Indonesia mendapatkan nilai sebesar Rp.86.770,78. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp 983.928,14. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Syariah Indonesia mendapatkan nilai sebesar Rp. 954.170,50. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Syariah Indonesia lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator ke dua yaitu Menegakkan keadilan.

c. Bank BCA Syariah (BBS)

*Sharia Maqasid Index* Bank BCA Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp.4.385.203,47. Kinerja SMI Bank BCA Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Amalia (2018) menunjukkan jika nilai SMI Bank BCA Syariah pada rentang tahun 2018 sebesar Rp. Rp.33.603.900. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank BCA Syariah mengalami penurunan pada tahun 2018-2022.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank BCA Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.200.401,33. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp. 887.861,05 Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank BCA Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp. 3.296.941,08.

Dari ketiga indikator tersebut, Bank BCA Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator ketiga yaitu Mencapai Kesejahteraan.

d. Bank Mega Syariah (BMS)

*Sharia Maqasid Index* Bank Mega Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp.2.980.566,47. Kinerja SMI Bank Mega Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Syahputra (2015) menunjukkan jika nilai SMI Bank Mega Syariah pada rentang tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 245.630. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Mega Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2018-2022.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Mega Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.2.342,10. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp. 963.245,82 Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Mega Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp. 2.014.978,55 Dari ketiga indikator tersebut, Bank Mega Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator ketiga yaitu Mencapai Kesejahteraan.

e. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS)

*Sharia Maqasid Index* Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp 983.122,57. Kinerja SMI Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah terlihat fluktuatif. Pada

penelitian sebelumnya yang dilakukan Amalia (2018) menunjukkan jika nilai SMI Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah pada rentang tahun 2018 sebesar Rp 32.556.400. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mengalami penurunan pada tahun 2018-2022.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.68.847,42. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp. 802.497,08. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.111.778,07. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

f. Bank Victoria Syariah (BVS)

*Sharia Maqasid Index*, Bank Victoria Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp.807.238,56. Kinerja SMI Bank Victoria Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Priyatno, Rohim, and Sari (2021) menunjukkan jika nilai SMI Bank Victoria Syariah pada rentang tahun 2021 sebesar Rp.184.530. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Victoria Syariah mengalami peningkatan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Victoria Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.1.676,07. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp. 767.369,45 Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Victoria Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.38.193,04 Dari ketiga indikator tersebut, Bank Victoria Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

g. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

*Sharia Maqasid Index* Bank Jabar Banten Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp. 1.516.794,22. Kinerja SMI Bank Jabar Banten Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Priyatno, Rohim, and Sari (2021) menunjukkan jika nilai SMI Bank Jabar Banten Syariah pada rentang tahun 2021 sebesar Rp. 312.420. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Jabar Banten Syariah mengalami peningkatan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Jabar Banten Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.6.073,59. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp.1.376.085,81. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Jabar Banten Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.134.634,82. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Jabar

Banten Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

h. Bank Aceh Syariah (BAS)

*Sharia Maqasid Index* Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp.27.457.648,53. Kinerja SMI Bank Aceh Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Amalia (2018) menunjukkan jika nilai SMI Bank Aceh Syariah pada rentang tahun 2018 sebesar Rp.26.282.600. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Aceh Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.3.645,86. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp.20.215.763. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Aceh Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.7.238.239,44. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Aceh Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

i. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS)

*Sharia Maqasid Index* BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2018-2022 sebesar Rp.713.296,15. Kinerja SMI BPD Nusa Tenggara Barat Syariah terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Amalia (2018) menunjukkan jika nilai

SMI BPD Nusa Tenggara Barat Syariah pada rentang tahun 2018 sebesar Rp.28.582.100. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI BPD Nusa Tenggara Barat Syariah mengalami peningkatan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.7.508,34. Kemudian pada indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp.676.597,72. Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah mendapatkan nilai sebesar Rp.29.190,09. Dari ketiga indikator tersebut, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

j. Bank Syariah Bukopin (BSB)

*Sharia Maqasid Index* Bank Syariah Bukopin tahun 2018-2022 sebesar Rp.858.583,36. Kinerja SMI Bank Syariah Bukopin terlihat fluktuatif. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Syahputra (2015) menunjukkan jika nilai SMI Bank Syariah Bukopin pada rentang tahun 2015 sebesar Rp.265.990. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SMI Bank Syariah Bukopin mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022.

Pada Indikator pertama Mendidik Individu, Bank Syariah Bukopin mendapatkan nilai sebesar Rp.3.565,46. Kemudian pada

indikator kedua Menegakkan Keadilan mendapatkan nilai sebesar Rp. 777.958,17 Pada Indikator ketiga Mencapai Kesejahteraan, Bank Syariah Bukopin mendapatkan nilai sebesar Rp.77.059,73. Dari ketiga indikator tersebut, Bank Syariah Bukopin lebih besar mengalokasikan dananya kepada indikator kedua yaitu Menegakkan Keadilan.

## **2. Hasil Perbandingan Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Berdasarkan *Sharia Maqasid Index* (SMI) Pada Periode 2018-2022**

Berdasarkan perhitungan kinerja bank syariah dengan *Sharia Maqasid Index*, Bank Aceh Syariah (BAS) memiliki nilai SMI yang lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Syariah lainnya. Bank Aceh Syariah memperoleh nilai Rp.27.457.648,53. Namun, dalam beberapa elemen rasio *Sharia Maqashid Index*, bank umum syariah lainnya menunjukkan performa yang lebih baik. Misalnya, dalam elemen pertama tujuan Mendidik Individu yaitu rasio hibah pendidikan, Bank Syariah Indonesia memiliki nilai Rp. 80.286,12 sementara Bank Aceh Syariah hanya Rp. 3.645,86. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin dan Bank BCA Syariah juga lebih unggul dalam rasio penelitian, pelatihan dan publisitas/promosi dibandingkan dengan Bank Aceh Syariah. Sebaliknya, Bank Aceh Syariah lebih unggul dalam beberapa elemen lain, seperti rasio harga produk terjangkau dan rasio pendapatan personal.

Pada indikator kinerja pertama, yaitu Mendidik Individu, Bank Aceh Syariah juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah dan Bank Victoria. Untuk indikator kinerja kedua *Sharia Maqasid Index*, yaitu Menegakkan Keadilan, Bank Aceh Syariah memiliki nilai lebih tinggi karena alokasi dana yang lebih besar untuk rasio harga produk terjangkau, yang meningkatkan nilai kinerja *Sharia Maqasid Index* nya dalam konsep ini. Untuk indikator terakhir, yaitu Mencapai Kesejahteraan, meskipun Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah unggul dalam rasio pendapatan personal dan rasio investasi pada sektor riil, hal ini tidak diimbangi dengan nilai rasio laba yang besar, sehingga kinerja Bank Aceh Syariah lebih unggul dalam konsep ketiga ini.

Dari hasil perbandingan ini dapat ditentukan peringkat dari bank umum syariah ditinjau dari *Sharia Maqasid Index* pada periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Peringkat Bank Umum Syariah Ditinjau dari *Sharia Maqasid Index* (SMI) Pada Periode 2018-2022**

Bank Umum Syariah	Sharia Mqasid Index (SMI)	
	SMI	Peringkat
BMI	915.232,34	7
BSI	2.024.869,42	4
BBS	4.385.203,47	2
BMS	2.980.566,47	3
BTPNS	983.122,57	6
BVS	807.238,56	9
BJBS	1.516.794,22	5
BAS	27.457.648,53	1
BNTBS	713.296,15	10
BSB	858.583,36	8

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa peringkat pertama nilai SMI tertinggi ditempati oleh Bank BCA Syariah dengan nilai rata rata pada tahun 2018-2022 sebesar Rp.27.457.648,53. Peringkat kedua nilai SMI tertinggi ditempati oleh Bank BCA Syariah dengan nilai rata rata pada tahun 2018-2022 sebesar Rp.4.385.203,47 dan peringkat ketiga nilai SMI tertinggi ditempati oleh Bank Mega Syariah dengan nilai rata rata pada tahun 2018-2022 sebesar Rp. 2.980.566,47. Seluruh nilai ini terus mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya sehingga hasil dari penelitian ini bisa berbeda setiap tahunnya.

Hasil Penelitian ini konsisten sesuai dengan temuan Faizah (2021), yang menyatakan bahwa setiap bank syariah memiliki kelebihan tersendiri dalam pencapaian setiap tujuan *Sharia Maqasid Index*, serta ada bank yang tidak lengkap dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian kinerja. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil temuan Amalia (2018), yang menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah secara umum memperoleh peringkat ketiga belas pada *Sharia Maqasid Index* selama periode 2018. Dalam temuan yang lain Priyatno, rohim dan sari (2021) menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah secara umum memperoleh peringkat kesepuluh pada *Sharia Maqasid Index* selama periode 2021

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencapaian *Sharia Maqasid Index* pada 10 bank umum syariah yang diteliti, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aceh Syariah BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Namun, penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai apakah pencapaian *Sharia Maqasid Index* tersebut baik atau buruk. Hal ini disebabkan karena belum ada nilai pasti yang dapat menentukan kualitas hasil *Sharia Maqasid Index*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan standar penilaian *Sharia Maqasid Index*, sehingga ke depannya dapat ditentukan apakah pencapaian *Sharia Maqasid Index* tersebut baik atau buruk.